

**ANALISA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM POLITIK
(STUDI DPW PARTAI PERINDO SUMUT)**

TESIS

OLEH

**WIM PUTRA TRI PRATAMA S
221801013**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)4/7/24

ANALISA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM POLITIK (STUDI DPW PARTAI PERINDO SUMUT)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**WIM PUTRA TRI PRATAMA S
NPM. 221801013**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)4/7/24

UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Analisa Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik (Studi Dpw
Partai Perindo Sumut)**

N a m a : Wim Putra Tri Pratama S
N I M : 221801013

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si



Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Beby Masitho Batubara, MAP

Direktur



Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 02April 2024

Nama : Wim Putra Tri Pratama S

NPM : 221801013



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Marlon Sihombing, M.A
Sekretaris : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si
Pembimbing I : Prof. Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si
Pembimbing II : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP
Penguji Tamu : Dr. Warjio, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)4/7/24

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, April 2024
Yang menyatakan,



WIM PUTRA TRI PRATAMA S

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wim Putra Tri Pratama S
NPM : 221801013
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisa Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik (Studi DPW Partai Perindo Sumut)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan



Wim Putra Tri Pratama S

A B S T R A K

ANALISA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM POLITIK (STUDI DPW PARTAI PERINDO SUMUT)

N a m a : Wim Putra Tri Pratama S
N I M : 221801013
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si
Pembimbing II : Dr. Maksun Syahri Lubis, S.STP, MAP

Rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga politik mengakibatkan berbagai kepentingan perempuan kurang terakomodasi dalam sejumlah keputusan politik. Rumusan masalah penelitian 1) Bagaimana pemberdayaan perempuan dalam politik oleh DPW Partai Perindo Sumut? 2) Apa saja faktor penghambat pemberdayaan perempuan dalam politik oleh DPW Partai Perindo Sumut? Metode yang digunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian pemberdayaan perempuan dalam politik (studi DPW Partai Perindo Sumut) sudah berjalan dengan baik. Perencanaan yang dilakukan dalam mengaplikasikan responsive gender sudah baik. Terlihat dalam rencana sosialisasi yang dibuat. Pelaksanaan sudah maksimal. Dengan adanya strategi yang dimiliki Partai Perindo dengan lebih banyak melakukan pendekatan secara personal. Evaluasi mencapai hasil yang baik. Lewat peningkatan kualitas pendidikan nasional, dorongan para perempuan untuk berkiprah di bidang politik, dapat diwujudkan. Saran dalam penelitian yaitu Lembaga KPU mengadakan sosialisasi yang terfokus pada keterwakilan 30% perempuan. Serta membuat perubahan yang signifikan mengenai kuota anggota DPRD khusus perempuan. Dapat membuat kebijakan bahwa dalam politik kesetaraan Gender itu diperlukan. Karena budaya patriarki sangat tidak relevan untuk digunakan pada saat pemilu. Dibutuhkan kampanye nasional berjangka panjang. Yang berisikan kesadaran politik perempuan, penafsiran ulang (reinterpretasi) doktrin-doktrin agama yang mencerabut hak politik perempuan melalui media. Baik media cetak atau elektronik seperti poster, baliho, stiker dan pin-pin bergambar.

Kata Kunci: Analisa, Pemberdayaan, Perempuan, Politik.

ABSTRACT

ANALYSIS OF WOMEN'S EMPOWERMENT IN POLITICS (STUDY OF THE DPW PARTAI PERINDO SUMUT)

Name : Wim Putra Tri Pratama S
NIM : 221801013
Study Program : Master of Public Administration Science
Supervisor I : Prof. Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si
Supervisor II : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

The low participation of women in political institutions means that various women's interests are less accommodated in a number of political decisions. Research problem formulation 1) How is women empowered in politics by the North Sumatra Perindo Partai DPW? 2) What are the factors inhibiting women's empowerment in politics by the North Sumatra Perindo Partai DPW? The method used is a qualitative research method. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The results of research on women's empowerment in politics (the North Sumatra Perindo Partai DPW study) have gone well. The planning carried out in implementing gender responsiveness is good. This can be seen in the socialization plans made. Implementation has been maximized. With the Perindo Partai's strategy of taking a more personal approach. The evaluation achieved good results. By improving the quality of national education, the encouragement of women to take part in politics can be realized. The suggestion in the research is that the KPU Institute hold outreach that focuses on 30% representation of women. As well as making significant changes regarding the quota for DPRD members specifically for women. Can make policies that in politics gender equality is necessary. Because patriarchal culture is very irrelevant to use during elections. A long-term national campaign is needed. Which contains women's political awareness, reinterpretation of religious doctrines that take away women's political rights through the media. Both printed and electronic media such as posters, billboards, stickers and pins with images.

Keywords: Analysis, Empowerment, Political, Woman.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan rahmatNya sehingga Tesis yang berjudul “Analisa Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik (Studi DPW Partai Perindo Sumut)” dapat tercapai dan terselesaikan sesuai dan seturut dengan kehendakNya. Tesis ini tidak akan mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari segala pihak yang ikut andil dalam berbagai aspek selama masa perkuliahan penulis.

Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc**, Rektor Universitas Medan Area.
2. Yang terhormat, Ibu **Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**, Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Yang terhormat, **Ibu Dr. Beby Masitho Batubara, MAP** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik.
4. Yang terhormat, Ibu **Prof. Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si** selaku pembimbing I yang dengan sabar memberikan pengarahan dan waktunya dalam penyusunan Tesis ini.
5. Yang terhormat, Bapak **Dr. Maksun Syahri Lubis, S.STP, MAP** selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan saran.
6. Yang terhormat, Bapak **Dr. Rudi Salam Sinaga, S.sos, M.Si** selaku sekretaris seminar yang telah membantu dalam penulisan.
7. Yang terhormat, Ibu **Santa Joana Donna Yulietta Siagian, S.E, MAP**

selaku Sekwil Partai Perindo yang telah memberi izin untuk melakukan

penelitian dan membantu penulis dalam melakukan pengumpulan data penelitian.

Dengan tersusunnya Tesis ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua, Almarhum Bapak Kopol. Purn. J. Sigiros dan Ibu Tina Manurung yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi dan dukungan lahir maupun batin serta do'a yang tiada henti kepada penulis. Kakak Nyta Sigiros, S.S, S.Pd dan Abang Frank Sigiros, S.T terima kasih atas dukungan dan semangatnya, semoga Tuhan Yesus selalu memberkati, melindungi dan beserta kita selalu.

Dengan penulisan Tesis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk kritik maupun saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, dan pada segala pihak yang membutuhkan pada umumnya.

Medan, Januari 2024



Wim Putra Tri Pratama S

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian Pemberdayaan	7
2.1.1 Tujuan Pemberdayaan.....	7
2.1.2 Strategi Pemberdayaan	8
2.2 Pemberdayaan Perempuan	9
2.3 Indikator Pemberdayaan.....	11
2.4 Pengertian Politik	13
2.5 Kerangka Pemikiran.....	15
2.6 Penelitian Terdahulu	15
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	20
3.3 Informan Penelitian	21
3.4 Teknik Pengumpulan Data	22
3.4.1 Observasi	22
3.4.2 Wawancara	22

3.4.3 Dokumentasi	24
3.5 Teknik Analisis Data.....	24
3.5.1 Reduksi Data.....	25
3.5.2 Penyajian Data	26
3.5.3 Menarik Kesimpulan.....	26
3.6 Definisi Konsep dan Definisi Operasional.....	27
3.6.1 Definisi Konsep	27
3.6.2 Definisi Operasional	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Sejarah Partai Perindo	30
4.1.1 Visi Misi Partai Perindo.....	30
4.1.2 Struktur Organisasi	31
4.2 Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik.....	31
4.2.1 Perencanaan	31
4.2.2 Pelaksanaan.....	36
4.2.3 Evaluasi	44
4.3 Faktor Penghambat.....	48
4.3.1 Budaya Patriarki	48
4.3.2 Sumber Daya Wanita.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1	Skema Kerangka Konseptual 15
Gambar 2	Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman 27
Gambar 3	Struktur Organisasi 31
Gambar 4	Konsolidasi 40
Gambar 5	Pemberdayaan Perempuan Melalui UMKM 42



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1 Kepengurusan Partai Perindo	3
Tabel 2 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3 Pelaksanaan kegiatan sosialisasi.....	35



DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	62
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	63
Lampiran 3 Surat penelitian	66
Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai salah satu Negara demokrasi, dimana kedudukan perempuan secara formal cukup kuat dikarenakan banyak ketentuan dalam berbagai Undang-Undang serta peraturan lain yang memberi perlindungan yuridis di dalamnya. Stereotip peran dan bias gender masih meluas dalam berbagai tingkatan, baik di semua Negara di dunia dan tercermin dalam tatanan sosial, ekonomi dan politik. Di banyaknya Negara, perempuan masih dipersulit untuk bersaing langsung dengan laki-laki dan mendapat perhatian dan interaksi publik, dan diberikan peran yang menjauhkan mereka dalam pembuatan keputusan. Sementara dukungan formal partai politik bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dengan adanya peran dan bias gender yang berlapis dan meluas, dukungan tersebut diperlukan untuk mengatasi hambatan terhadap partisipasi perempuan dalam politik dan dalam kehidupan partai politik (Julie Ballington, 2011).

Salah satu fenomena yang masih terus hangat diperbincangkan dalam publik dan politik adalah permasalahan gender atau kesetaraan gender yang masih nampak senjang. Istilah gender merujuk pada karakteristik dan ciri-ciri sosial yang diasosiasikan pada laki-laki dan perempuan (Shalihin & Firdaus, 2019). Karakteristik dan ciri yang diasosiasikan tidak hanya didasarkan pada perbedaan biologis, melainkan juga pada interpretasi sosial dan *cultural* tentang apa artinya menjadi laki-laki atau perempuan (Rahmawati, 2004). Membangun masyarakat sipil berarti memperjuangkan ruang publik yang di dalamnya mencakup seluruh warga Negara

baik laki-laki maupun perempuan tanpa adanya pengecualian. Dalam sistem politik selama ini, kebijakan berlaku menempatkan perempuan hanya sebagai *second person*. Rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik mengakibatkan berbagai kepentingan perempuan kurang terakomodasi dalam sejumlah keputusan politik, karena sejumlah keputusan politik yang dibuat cenderung berwatak maskulin dan kurang berperspektif gender, sementara sebagian besar keputusan politik yang dibuat selalu melibatkan perempuan sebagai sasarannya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur partai politik untuk dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota di Indonesia dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Peraturan tersebut merupakan upaya agar perempuan secara kuantitas tampil dalam politik. Walaupun fakta di lapangan di dapatkan bahwa keterwakilan perempuan dalam parlemen masih rendah. Secara regulasi, perempuan sudah diberi ruang yang luas, namun realitasnya afirmasi kuota 30% tersebut sepertinya belum menempatkan perempuan pada posisi yang diharapkan.

Hal ini dapat dilihat dari perolehan kursi perempuan yang ada di DPRD Kota Medan. Permasalahan mengenai rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif menjadi suatu hal yang penting untuk dikaji, karena melalui ranah tersebut perempuan dapat merepresentasikan aspirasinya. Bahwa saat ini terdapat banyak kaum perempuan yang sudah memiliki kepedulian terhadap isu gender, kesejahteraan, pendidikan, maupun anti kekerasan. Namun kaum perempuan tidak akan bisa berjalan sendiri dalam menyalurkan aspirasi yang dimiliki tanpa adanya suatu wadah yang tepat. Wadah yang dimaksud dalam konteks ini adalah partai politik. Melalui partai

politik, kaum perempuan dapat memperjuangkan kepentingannya secara nyata di segala bidang khususnya dalam bidang politik, sehingga partai politik menjadi salah satu faktor penting yang dapat menentukan partisipasi politik dan keterwakilan politik kaum perempuan.

Dalam hal keanggotaan di DPW Partai Perindo Sumut, jumlah perempuan yang terpilih masih rendah. Hanya ada 5 perempuan yang duduk di DPRD Medan. Padahal jumlah pemilih perempuan tidak berbeda jauh antara laki-laki (*Sumber: Ketua DPW Pemuda Perindo Sumut, Bapak Hasbi Simanjuntak*). Maka keterwakilan perempuan di DPW Partai Perindo Sumut dapat di katakan masih minim. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Kepengurusan Partai Perindo Tingkat Provinsi Sumatera Utara

1.	Ketua	Rudi Zulham Hasibuan
2.	Sekretaris	J. Donna Yulietta Siagian, SE
3.	Bendahara	Januazir Chuwardi
4.	No. Kep. Kepengurusan Partai	343-SK/DPP - PARTAI PERINDO/II/2022
5.	Tanggal Keputusan	24-02-2022
6.	Jumlah Pengurus	5
7.	Jumlah Keterwakilan Perempuan	2

Sumber Data: Detail Partai Politik Perindo, 2023.

Data tersebut menunjukkan bahwa banyaknya partai politik yang bermunculan tidak menjamin tingginya angka keterwakilan kaum perempuan dalam ranah politik, sehingga berimbas pada partai politik yang secara umum dijadikan sebagai kendaraan dalam mengikuti rangkaian pemilihan umum. Hal tersebut mengindikasikan bahwa partai politik di Indonesia masih belum siap dalam memberdayakan kader perempuan,

terbukti dengan masih minimnya posisi perempuan dalam jabatan strategis di partai politik.

Dalam konteks politik, peran dan posisi kaum perempuan cukup mengalami diskriminasi. Harus diakui bahwa kaum perempuan di Indonesia, yang merupakan mayoritas, masih buta terhadap wacana politik. Peran dan posisi perempuan di wilayah pengambil kebijakan masih sangatlah minim. Sedangkan keterwakilan perempuan di parlemen juga sangat penting dalam pengambilan keputusan publik karena akan berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga Negara dan publik. Selain itu juga akan membawa perempuan pada cara pandang yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik karena perempuan akan lebih berpikir holistic dan berresponsif gender. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Partai Politik serta Undang-Undang yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana bakal calon sebagaimana yang dimaksud pasal 245 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Dengan adanya peraturan tentang keterwakilan perempuan dalam legislatif, maka pemerintah berfikir guna mendongkrak eksistensi perempuan di dunia politik. Pemenuhan 30% keterwakilan perempuan dalam politik khususnya dalam lembaga legislatif kini menjadi salah satu pencapaian yang penting.

Maka permasalahan tersebut menunjukkan bahwa antara teks dan konteks beserta pemaknaan yang terjadi sangatlah menunjukkan ketimpangan dan bahkan menggiring berbagai pihak untuk melakukan multitafsir terhadap peran perempuan di pentas politik, sehingga akan bermuara pada ketidakjelasan keterjaminan pemenuhan hak-hak perempuan. Maka dapat dipahami bahwa definisi suatu partai politik yang

dianggap sebagai wadah, sangatlah penting dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis akan menganalisa bagaimana pemberdayaan perempuan dalam partai politik oleh DPW Partai Perindo Sumut. Dari berbagai partai politik yang ada di Sumatera Utara, penulis hanya memfokuskan penelitiannya terhadap Partai Perindo. Dikarenakan Partai Perindo merupakan partai yang membawa nilai-nilai nasionalis di tengah masyarakat dan mendominasi di Sumatera Utara dengan jumlah kader dan pendukung yang cukup banyak. Partai Perindo juga merupakan partai yang sama-sama berhasil membawa kader perempuannya untuk mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberdayaan perempuan dalam politik oleh DPW Partai Perindo Sumut?
2. Apa saja faktor penghambat pemberdayaan perempuan dalam politik oleh DPW Partai Perindo Sumut?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pemberdayaan perempuan dalam politik oleh DPW Partai Perindo Sumut.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan apa saja faktor penghambat pemberdayaan perempuan dalam politik oleh DPW Partai Perindo Sumut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini dapat memberikan manfaat teoritis di antaranya:

- a. Merupakan sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang pemberdayaan perempuan dalam ranah politik.
- b. Penulisan ini dapat digunakan dalam penerapan Ilmu Administrasi Publik. Khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dalam partai politik.
- c. Memberikan kontribusi sebagai bahan referensi untuk penulisan sejenis.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan penulisan mengenai pemberdayaan perempuan dalam politik, maka manfaat yang diperoleh adalah:

- a. Melalui hasil penulisan akan diketahui bagaimana pemberdayaan perempuan dalam politik yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- b. Sebagai saran dan masukan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dalam politik oleh partai politik.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan dalam pembentukan individu dan komunitas yang mandiri. Pemberdayaan maka kekuatan atau kemampuan (Trisnawati dan Jatiningih, 2017). Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, proses dimana perubahan kemampuan seseorang ke arah yang lebih baik dengan cara menggali dan kemudian dikembangkan. Sedangkan menurut Priyono, S. Onni dan Prakarna, A.M.W (2008) pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Pemberdayaan adalah bagaimana menjadikan seseorang mampu berdiri sendiri (Widiastuti & Prita Kartika, 2017). Dari pengertian tersebut maka pemberdayaan menekankan pada perubahan dan pengembangan yang lebih baik. Hal ini berarti mendorong manusia untuk memiliki kesempatan dalam mewujudkan potensi melalui upaya sendiri, sehingga sepenuhnya sadar untuk membentuk masa depan.

2.1.1 Tujuan Pemberdayaan

Sebagai tujuan dari pemberdayaan yang merujuk pada keadaan dan hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yakni masyarakat yang diberdayakan, yang memiliki kekuasaan dan mempunyai pengetahuan serta kemampuan memenuhi kebutuhan dalam hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti

memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi-aspirasi, mempunyai mata pencaharian, ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Oleh karena itu tujuan dari pemberdayaan seringkali digunakan sebagai indikator tercapainya keberhasilan pemberdayaan. Menurut Asep Usman Ismail dikutip dalam Alfadia (2017) indikator tingkat keberhasilan pemberdayaan yang pokok yaitu munculnya tingkat kepercayaan diri orang-orang bahwa mereka sanggup untuk merubah nasibnya, mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Dengan kata lain tujuan dari pemberdayaan adalah sebuah rasa yang memunculkan tingkat percaya diri pada masyarakat yang lemah sehingga mereka yakin bahwa mereka bisa merubah hidupnya ke arah yang lebih baik.

2.1.2 Strategi Pemberdayaan

Menurut Suharto (2019) dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras pemberdayaan yaitu:

1. Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya, model ini sering disebut dengan pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

2. Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan

kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.

3. Aras Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, dan pengorganisasian masyarakat.

2.2 Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan menurut Aida Vitayala dalam Tsaniatu Zakia (2021) adalah peningkatan hak, kewajiban, kedudukan, kemampuan, peran, kesempatan, kemandirian, ketahanan mental, dan spiritual wanita sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan keterampilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Sulaiman Asang (2012) pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan paradigma baru pembangunan untuk memberdayakan perempuan dengan cara membangun daya melalui:

1. Memotivasi

Memotivasi perempuan dalam proses pemberdayaan perempuan adalah mendorong menumbuhkan semangat untuk mempermudah melakukan kegiatan pengembangan diri, agar dapat menggunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

2. Menggali potensi

Menggali potensi dalam pemberdayaan merupakan kebutuhan fisik untuk meningkatkan kualitas diri, potensi menekan pada proses meningkatkan kemampuan,

mendorong untuk dapat menentukan pilihan hidup yang merupakan upaya untuk memandirikan dan menyetarakan kaum perempuan (*gender*).

3. Membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki

Pendekatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan kesadaran untuk keterlibatan mengorganisir diri agar lebih maju serta ada upaya meningkatnya ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Metode pada pemberdayaan perempuan bukanlah sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme pencegahan proses pemikiran lebih lanjut. Paradigma pemberdayaan perempuan menuntut pendekatan yang tidak memposisikan perempuan sebagai obyek dari berbagai aksi pembangunan, tetapi harus menempatkan perempuan sebagai subyek kegiatan.

4. Memberikan kesempatan berperan seluas-luasnya

Kontribusi perempuan tidak cukup hanya ditandai dalam bentuk uang, tenaga dan in-natural lainnya, melainkan harus menghadirkan unsur inisiatif dan determinasi yang benar-benar tumbuh dari perempuan.

Tikson (2002) pemberdayaan perempuan yaitu memberi kesempatan dan mendorong individu untuk mengambil bagian dan tanggung jawab baik perorangan ataupun kelompok guna meningkatkan kemampuan dalam memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi. Pemberdayaan perempuan merupakan cara yang dapat ditempuh untuk menggali dan mengembangkan potensi perempuan agar berkualitas dan produktif sebagai langkah awal untuk memberikan kesempatan mengambil tanggung jawab guna meningkatkan dan memberikan kontribusi organisasi. Selain itu menurut Hardiana (2018) pemberdayaan perempuan merupakan bentuk upaya optimalisasi potensi perempuan secara umum dengan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif di masyarakat dan pemerintahan. Pemberdayaan perempuan merupakan suatu proses pembentukan kapasitas dan kesadaran perilaku

yang lebih menekankan pada partisipasi perempuan yang lebih besar sehingga memiliki sentralisasi peran dan pengawasan dalam merumuskan kebijakan dan keputusan yang transformasional sehingga dengan itu perempuan dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat.

2.3 Indikator Pemberdayaan

Menurut Suharto (2019) indikator keberhasilan dari pemberdayaan perempuan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin.
- b. Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi diri mereka.
- c. Meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga dengan demikian, perempuan mempunyai peluang semakin besar dalam mengembangkan karier sebagaimana halnya laki-laki.
- d. Adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif dan pemerintahan.
- e. Peningkatan keterlibatan aktivis perempuan dalam kampanye pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan.

Ada beberapa indikator pemberdayaan yang dikemukakan oleh Schuler, Hashemi, dan Riley (Mulyana & Asiah, 2017) yaitu:

- a. Kebebasan mobilitas, yaitu kemampuan individu. Tingkat mobilitas di anggap tinggi jika individu atau perempuan mampu untuk pergi sendirian.
- b. Kemampuan membeli komoditas “kecil” yaitu kemampuan individu atau perempuan untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari dan kebutuhan sehari-hari untuk dirinya. Individu tersebut dianggap mampu

melakukan kegiatan ini terutama jika individu tersebut dapat membuat

keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya. Terlebih lagi jika perempuan tersebut dapat membeli komoditas tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

- c. Kemampuan membeli komoditas “besar” yaitu kemampuan individu atau perempuan untuk membeli barang-barang yang bersifat sekunder atau tersier, tanpa meminta izin pasangannya dan lebih tinggi lagi jika menggunakan uang sendiri dalam membeli komoditas tersebut.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, yaitu mampu untuk membuat keputusan sendiri maupun bersama suami mengenai keputusan-keputusan keluarga.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga.
- f. Kesadaran hukum dan politik, contohnya dapat menyebutkan para pemimpin masyarakatnya, mengetahui pentingnya mempunyai surat nikah dan hukum waris.
- g. Keterlibatan dalam kegiatan politik praktis.
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga seperti memiliki tempat tinggal, aset produktif, dan tabungan.

Menurut Sudjana (2006) indikator keberhasilan pemberdayaan antara lain:

- a. Perencanaan

Perencanaan ialah upaya sistematis yang menggambarkan penyusunan rangkaian atau tindakan yang akan dilakukan untuk pencapaian tujuan organisasi/lembaga atau perencanaan dalam kegiatan untuk menggerakkan atau menggunakan sumber-sumber yang terbatas secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- b. Pelaksanaan

Dalam kegiatan pelaksanaan ialah suatu proses yang dimulai dari implementasi

awal yang mencakup persiapan-persiapan sebelum kegiatan, dilakukan implementasi merupakan aspek-aspek dalam kegiatan teknis. Sedangkan implementasi akhir mencakup akhir dalam pelaksanaan kegiatan yang meliputi hasil kegiatan dan pelaporan.

c. Evaluasi

Evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan kegagalan suatu rencana kegiatan atau tujuan. Evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan kegagalan suatu rencana kegiatan atau tujuan. Evaluasi merupakan proses pengumpulan dan analisis data atau informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan atau nilai tambah dari kegiatan.

Berdasarkan beberapa uraian diatas mengenai indikator-indikator pemberdayaan perempuan, maka penulis mengambil indikator menurut teori menurut Sudjana, (2006) yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi.

2.4 Pengertian Politik

Hidajat Imam (2009) mengartikan bahwa politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang berarti kota yang berstatus negara kota (*city state*). Dalam negara kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya (Basri Seta, 2011). Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat di tafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak di pengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik (Budiardjo Miriam, 2007). Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di

mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif

(Gabriel A. Almond dalam Basri Seta, 2011).

Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan instrumen otoritatif dan koersif dalam pembuatan keputusan publik berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari suatu keputusan yang disepakati. Definisi politik juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik (*polity*) untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik. Menurut Andrey Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama (Andrew Heywood dalam Budiardjo Miriam, 2007).

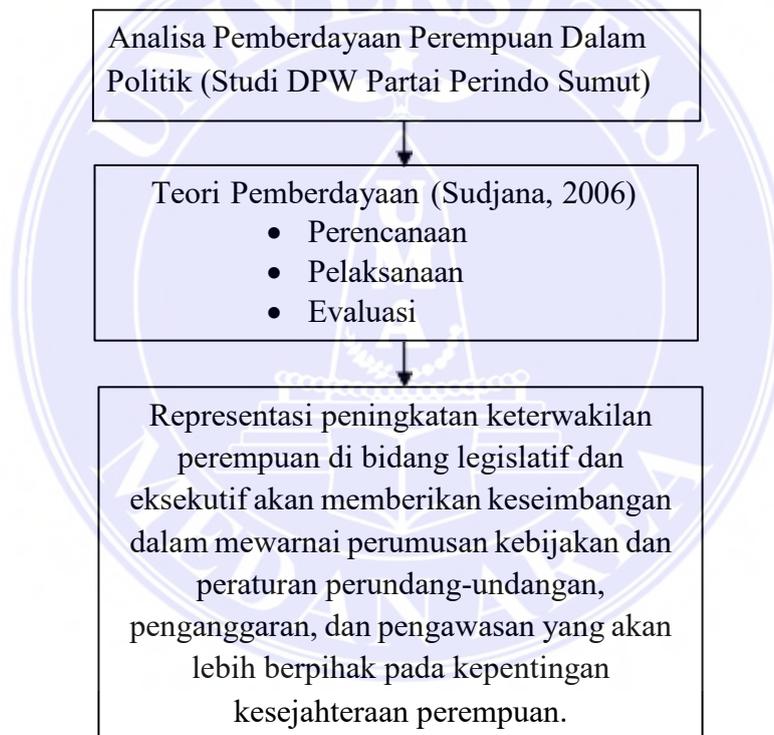
Dengan definisi tersebut, secara tersirat mengungkap bahwa masyarakat politik (*polity*) dalam proses interaksi pembuatan keputusan publik juga tidak lepas dari konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan kata lain, masing-masing kelompok saling mempengaruhi agar suatu keputusan publik yang disepakati sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu. Oleh sebab itu, sebuah kelaziman apabila dalam realitas sehari-hari sering dijumpai aktivitas politik yang tidak terpuji dilakukan oleh kelompok politik tertentu demi mencapai tujuan yang di cita-citakan. Peter Merkl menyatakan bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri-sendiri (Peter Merkl dalam Budiardjo Miriam, 2007).

Sedangkan pengertian politik menurut Paramitha (2017) adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer dan digunakan.

Kegiatan politik diusahakan untuk mencapai keseimbangan dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama dalam sebuah organisasi. Ketika keseimbangan tersebut tercapai, maka kepentingan individu akan mendorong pencapaian kepentingan bersama. Dengan begitu politik erat dengan pengambilan kebijakan pemerintah, yang secara normatif harus bersih dan berhasil. Sehingga beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa definisi politik secara umum adalah usaha-usaha yang ditempuh orang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang di jabarkan dalam penelitian ini meliputi:



Gambar 1
Skema Kerangka Konseptual

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan acuan dalam penulisan penulis saat ini. Penulis mengambil beberapa contoh dari penelitian yang terkait sebelumnya, penelitian yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dalam politik. Oleh sebab itu penulis mengambil beberapa penelitian sebagai berikut.

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

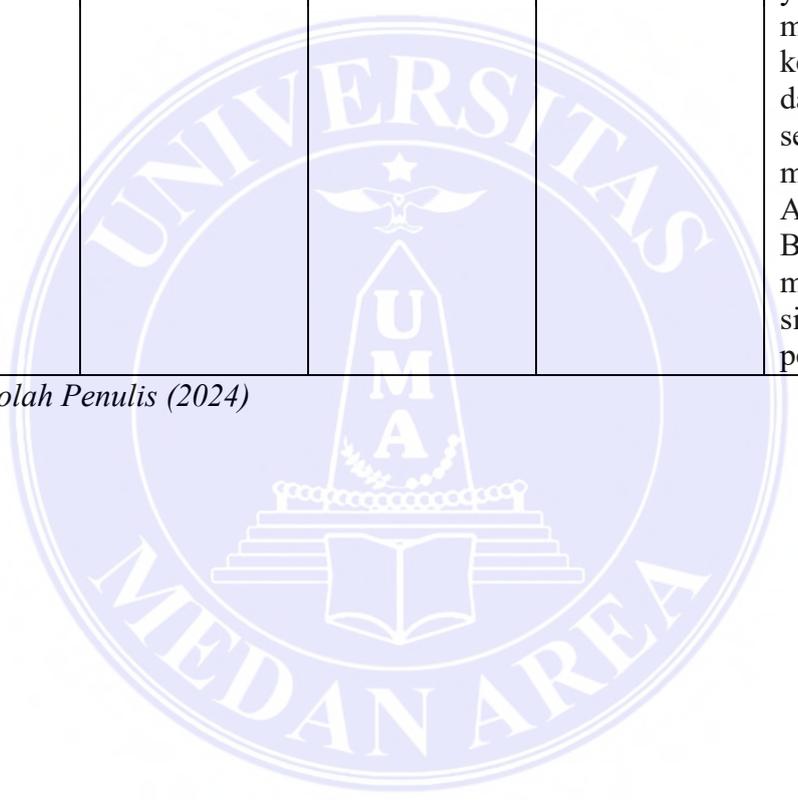
No.	Nama Dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pemberdayaan Perempuan Dalam Partai Politik Di Provinsi Bali (Studi Pada Partai PDIP, Demokrat Dan PSI). Komang Eva Oktapiani, Bandiyah, Mirah Mahaswari. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, 2020.	Pemberdayaan perempuan dalam politik.	Partai PDIP, Partai Demokrat dan PSI di Provinsi Bali. Menggunakan teori Feminisme Liberal dari David Marsh dan Gerry Stoker.	Deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan kejadian dan fenomena yang terjadi sehingga mendapatkan informasi yang sesuai fakta dan situasi yang sebenarnya.	Bahwa partai tersebut memiliki menerapkan beberapa strategi pemberdayaan perempuan, namun implementasi nya tidak berjalan secara optimal karena dominasi masih kuat dan kepercayaan masyarakat terhadap laki-laki. Perlu suatu pemahaman bahwa perempuan juga dapat memperjuangkan hak yang sama.
2.	Jurnal Studi Gender dan Anak, 2021. Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia. Eza Tri Yandy, Muhammad Mustajab. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.	Partisipasi, dan peran perempuan dalam partai politik serta kendala-kendala yang dialami perempuan dalam partai politik.	Metode yang digunakan studi kepustakaan (<i>library research</i>).	Studi kepustakaan (<i>library research</i>), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap literatur tentang permasalahan, lalu menguraikan	Perkembangan eksistensi perempuan dalam politik di Indonesia terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Hal demikian merupakan dampak dari

				<p>seluruh masalah yang ada secara eksplisit. Dilakukan secara deduktif yakni menarik suatu simpulan dari uraian yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.</p>	<p>aturan/regulasi yang dibuat. Bahwa aturan yang bersifat legal dan mengikat merupakan indikator penting bagi kelompok perempuan, tinggal lagi golongan perempuan itu sendiri harus memaksimalkan peluang dan kesempatan yang ada. Agar para pimpinan partai dan lembaga penyelenggara pemilu menentukan kebijakan serta struktur politik dengan standarisasi yang berlaku.</p>
3.	<p>Jurnal Pendidikan Tambusai, FIP Universitas Pahlawan, 2021. Pemberdayaan Perempuan Dalam Partai Politik Di Provinsi Sumatera Barat (Studi Pada Partai Gerindra Dan</p>	<p>Untuk mengkaji bentuk pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh partai politik.</p>	<p>Partai politik Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.</p>	<p>Metode kualitatif dengan tipe studi kasus.</p>	<p>Bahwa partai politik, yakni Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan memberdayakan kader perempuannya dengan mengadakan pelatihan dan pendidikan politik serta memberikan</p>

	PPP). Firnanda Amdimas, Jendrius Jendrius, Maihasni Maihasni. Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia.				ruang penuh bagi kader perempuan untuk merumuskan kebijakan dan membuat kegiatan melalui organisasi sayap partai yang khusus mengurus kebutuhan perempuan.
4.	Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, Desember 2019 : 55 - 72. Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia. Anifatul Kiftiyah. Jurusan Pascasarjana Hukum Tatanegara UIN Sunan Ampel.	Bagaimana implementasi peran keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik di negara Indonesia.	Tentang peran perempuan dalam politik kebangsaan dengan metode analisis historis, sebuah analisis yang berdasarkan pada sejarah yang telah terjadi.	<i>Library research</i> dengan metode pendekatan kualitatif.	Adanya dikotomi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa adanya pengaruh budaya yang terbentuk di masyarakat yang secara umum masih mengikuti budaya patriarki. Yang akhirnya budaya tersebut mempengaruhi beberapa fungsi dan kedudukan perempuan termasuk sikap politik dan kehidupan sosial kaum perempuan di negara Indonesia.

					Bahwa faktor kurangnya peran perempuan dalam konteks politik kebangsaan adalah bukan karena Agama maupun budaya, akan tetapi sebagian kaum laki-laki yang mempunyai kepentingan dalam politik secara nasional memakai Agama dan Budaya untuk mendiskriminasi kaum perempuan.
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Diolah Penulis (2024)



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas untuk mengetahui makna yang tersembunyi dan untuk memahami interaksi *social* serta untuk mengembangkan teori, dan untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan. Mengingat bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memaknai berbagai fenomena yang ada atau yang terjadi dalam kenyataan sebagai ciri khas penelitian kualitatif, maka dalam hal ini bagaimana pemberdayaan perempuan dalam politik oleh DPW Partai Perindo Sumut, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Selain itu metode kualitatif dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara penulis dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Lexy J. Moleong, 2000).

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Kantor DPW Partai Perindo Sumut. Yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien Nomor 2-C Kel. Madras Hulu, Kota Medan. Berdasarkan fenomena yang ditemui bahwa rendahnya pemberdayaan perempuan dalam internal partai. Pemberdayaan perempuan dalam internal partai menjadi suatu hal yang penting dalam meningkatkan peran perempuan dan meningkatkan potensi diri agar lebih mampu mandiri dan berkarya karena pemberdayaan perempuan merupakan

bentuk upaya-upaya partai dalam mendukung kegiatan yang *responsive gender*, dan juga agar terbentuknya integritas kepribadian dan kemampuan perempuan untuk menggerakkan orang lain secara intensif sehingga dapat mempersiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin yang baik di masa depan dengan melalui proses sosialisasi politik dalam pemberdayaan.

Bagaimana bentuk pemberdayaan perempuan dalam politik oleh DPW Partai Perindo Sumut sangatlah menarik untuk diteliti agar mampu menempatkan keterwakilan perempuan demi mencapai kesempurnaan dalam meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2023 sampai dengan selesai.

3.3 Informan Penelitian

Dalam pendekatan kualitatif, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk subjek penelitian. Ada yang mengistilahkan *key informan* karena informan memberikan informasi tentang suatu kelompok atau identitas tertentu, dan informan bukan diharapkan menjadi representasi dari kelompok atau identitas tersebut. Istilah *key informan* tersebut secara substansial dipandang sebagai instrument utama dalam penelitian kualitatif (Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2009). Maka secara rinci yang dijadikan informan dalam penelitian adalah:

1. Informan kunci, yaitu Sekretaris DPW Partai Perindo Sumut.
2. Informan utama, yaitu Wakil Ketua Bidang Perempuan & Anak DPW Partai Perindo Sumut.
3. Informan tambahan, yaitu Wakil Ketua Bidang Kader, Anggota Dan Saksi DPW Partai Perindo Sumut dan masyarakat simpatisan Partai Perindo berjumlah 5 orang.

Subjek penelitian kualitatif merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran

penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian yang

akan dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan subjek penelitian sebagai sumber informasi hanyalah subjek yang dapat memberikan informasi (Nasution, 2003). Sumber data (subjek penelitian) yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu data sebagai hasil akhir dari penelitian. Untuk pengumpulan data yang konkrit penulis melaksanakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

3.4.1 Observasi

Dalam observasi ini penulis menggunakan jenis observasi non partisipan, yaitu penulis hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi penulis tidak aktif dan ikut serta secara langsung. Pengamatan dilakukan secara langsung untuk mendapatkan gambaran yang utuh terkait fokus penelitian. Hasil pengamatan disusun dalam catatan lapangan. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Situasi dan kondisi lingkungan Kantor DPW Partai Perindo Sumut.
- b. Keadaan sarana prasarana Kantor DPW Partai Perindo Sumut.
- c. Jumlah anggota di Kantor DPW Partai Perindo Sumut.
- d. Aktivitas atau kinerja anggota Kantor DPW Partai Perindo Sumut.

Teknik ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan perempuan dalam politik oleh DPW Partai Perindo Sumut.

3.4.2 Wawancara

Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan dengan berdialog dan tanya jawab dengan *key informan*. Hasil-hasil wawancara kemudian dituangkan dalam struktur ringkasan, yang dimulai dari penjelasan ringkas identitas, deskripsi situasi

atau konteks, identitas masalah, deskripsi data dan ditutup dengan pemunculan tema. Adapun alat dalam pengambilan data seperti, *tape recorder*, *handphone*, foto dan data yang termasuk ke dalam dokumentasi. Terdapat beberapa tahapan yang penulis lakukan dalam wawancara yaitu:

- a. Mengenalkan diri
- b. Menjelaskan maksud kedatangan
- c. Menjelaskan materi wawancara
- d. Mengajukan pertanyaan

Selain itu, agar informan dapat menyampaikan informasi yang komprehensif sebagaimana diharapkan penulis, maka penulis melakukan beberapa hal seperti:

- a. Menciptakan suasana wawancara yang kondusif dan tidak tegang.
- b. Mencari waktu dan tempat yang telah disepakati dengan informan.
- c. Memulai pertanyaan dari hal-hal sederhana hingga ke yang serius.
- d. Bersikap hormat dan ramah terhadap informan.
- e. Tidak menyangkal informasi yang diberikan informan.
- f. Tidak menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi yang tidak ada hubungannya dengan masalah atau tema penelitian.
- g. Tidak bersifat menggurui terhadap informan.
- h. Tidak menanyakan hal-hal yang membuat informan tersinggung atau marah.
- i. Dan dilakukan secara sendiri.
- j. Mengucapkan terima kasih setelah wawancara selesai dan minta disediakan waktu lagi jika ada informasi yang belum lengkap.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan teknik wawancara tidak terstruktur (*Unstructured Interview*) dengan bentuk pertanyaan terbuka sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Ini di dasarkan pada metode penelitian yang dipakai

oleh penulis yang tergantung pada pemahaman penulis dan data informasi yang

diperoleh dari observasi dan wawancara. Wawancara dalam penelitian ini, dilakukan kepada Sekretaris DPW Partai Perindo Sumut, Wakil Ketua Bidang Perempuan & Anak DPW Partai Perindo Sumut dan Wakil Ketua Bidang Kader, Anggota Dan Saksi DPW Partai Perindo Sumut yang di butuhkan dalam penelitian.

3.4.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan agenda. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data tentang:

- a. Sejarah singkat berdirinya Kantor DPW Partai Perindo Sumut.
- b. Struktur organisasi Kantor DPW Partai Perindo Sumut.
- c. Data-data anggota Kantor DPW Partai Perindo Sumut.

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan dalam politik oleh DPW Partai Perindo Sumut.

3.5 Teknik Analisis Data

Menganalisis data penelitian merupakan suatu langkah yang sangat kritis, apakah menggunakan data *statistic* atau *non statistic*. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun di luar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992). Menurut Miles & Huberman (1992) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, tahapan reduksi adalah membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo. Reduksi data atau transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah penulis dalam memahami data yang telah di peroleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna. Adapun panduan yang dijadikan dalam proses reduksi data, dapat di kemukakan sebagai berikut:

- a. Dari hasil wawancara, observasi, pencatatan dokumen, di buat catatan lapangan secara lengkap.
- b. Berdasarkan catatan lapangan, selanjutnya dibuat reduksi data. Reduksi data ini berupa pokok-pokok temuan yang penting.

- c. Dari reduksi data kemudian di ikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan suntingan penulis agar maknanya lebih jelas dan dapat dipahami. Sajian data ini, dilengkapi dengan faktor pendukung, antara lain metode, skema, bagan, tabel.
- d. Berdasarkan sajian data tersebut, kemudian di rumuskan kesimpulan sementara.
- e. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan penemuan data baru dan pemahaman baru, sehingga akan di dapat suatu kesimpulan yang valid dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Demikian seterusnya aktivitas penelitian ini berlangsung, yaitu terjadi interaksi yang terus menerus antara ketiga komponen analisisnya bersamaan dengan pengumpulan data baru yang di rasakan bisa menghasilkan data yang lengkap sehingga dapat dirumuskan kesimpulan akhir.

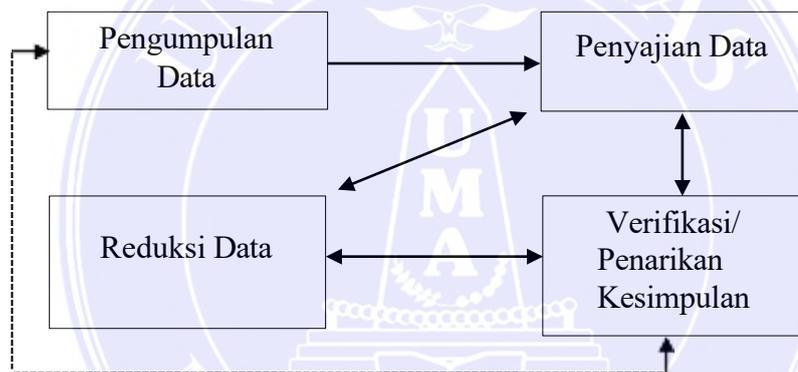
3.5.2 Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian apa yang sedang terjadi, akan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3.5.3 Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama

penelitian berlangsung. Verifikasi suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2
Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

3.6 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.6.1 Definisi Konsep

Definisi konsep yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya (Azwar, 2007).

a. Menurut Edi Suharto, Ph.D (2014) pemberdayaan yaitu sebuah proses dan tujuan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok maupun individu yang lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh suatu

perubahan sosial. Masyarakat yang berdaya dan memiliki pengetahuan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri dan mempunyai mata pencarian dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

b. Menurut Budhy Novian dalam Khairul Azmi (2020) pemberdayaan perempuan merupakan upaya pemampuan-perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

c. Menurut Miriam Budiardjo (2008) politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Pada sebuah kelompok masyarakat, dalam menghadapi terbatasnya sumber daya, perlu dicari suatu cara distribusi supaya seluruh masyarakat merasa bahagia dan puas.

3.6.2 Definisi Operasional

Definisi operasional, menurut Saifuddin Azwar (2007) adalah suatu definisi yang memiliki arti tunggal dan di terima secara objektif bilamana indikatornya tidak tampak. Indikator dalam penelitian ini atau dimensi yang di gunakan adalah:

1. Perencanaan

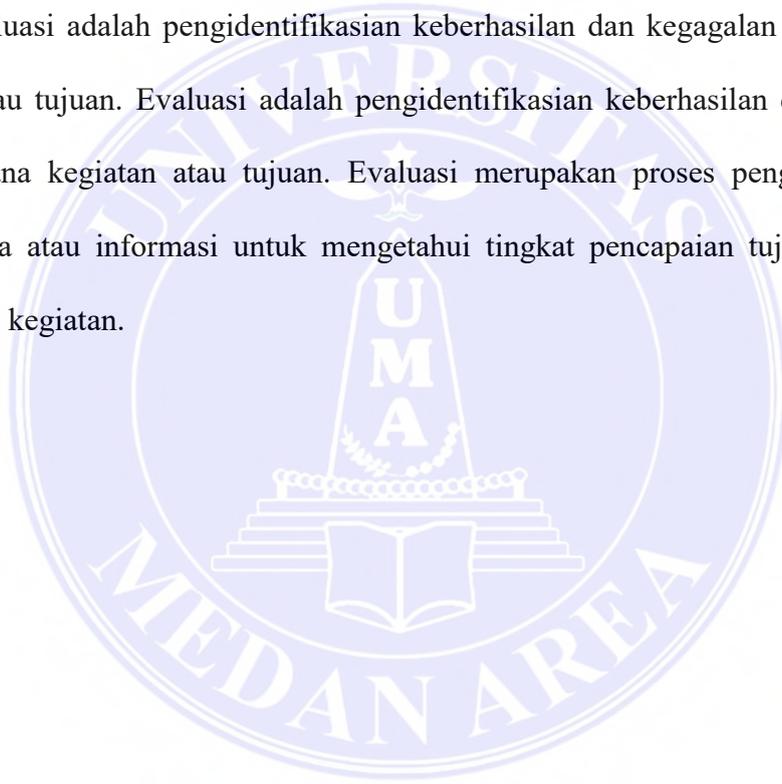
Perencanaan ialah upaya sistematis yang menggambarkan penyusunan rangkaian atau tindakan yang akan dilakukan untuk pencapaian tujuan organisasi/lembaga atau perencanaan dalam kegiatan untuk menggerakkan atau menggunakan sumber-sumber yang terbatas secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan

Dalam kegiatan pelaksanaan ialah suatu proses yang dimulai dari implementasi awal yang mencakup persiapan-persiapan sebelum kegiatan, dilakukan implementasi merupakan aspek-aspek dalam kegiatan teknis. Sedangkan implementasi akhir mencakup akhir dalam pelaksanaan kegiatan yang meliputi hasil kegiatan dan pelaporan.

3. Evaluasi

Evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan kegagalan suatu rencana kegiatan atau tujuan. Evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan kegagalan suatu rencana kegiatan atau tujuan. Evaluasi merupakan proses pengumpulan dan analisis data atau informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan atau nilai tambah dari kegiatan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai pemberdayaan perempuan dalam politik (studi DPW Partai Perindo Sumut) yang mengacu pada teori Pemberdayaan (Sudjana, 2006) dinilai sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut di buktikan dengan indikator sebagai berikut:

- a. Perencanaan DPW Partai Perindo Sumut dalam mengaplikasikan responsive gender sudah baik. Hal ini dapat dilihat dalam rencana sosialisasi yang dibuat DPW Partai Perindo Sumut, yang menjelaskan secara ideal visi, misi, strategi, tujuan dan capaian tentang keadilan dan kesetaraan gender. Secara konseptual rencana strategis sosialisasi tersebut telah mengakui dan menetapkan nilai dan isu gender sebagai bagian dari pembangunan.
- b. Pelaksanaan DPW Partai Perindo Sumut sudah maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya strategi yang dimiliki Partai Perindo. Yang dilakukan dengan lebih banyak melakukan pendekatan secara personal yang dapat membantu masyarakat untuk bisa mewakili suara mereka dengan pendekatan secara kekeluargaan.
- c. Evaluasi sudah dapat mencapai hasil yang baik dimana DPW Partai perindo Sumut berharap lewat peningkatan kualitas pendidikan nasional, dorongan para perempuan untuk berkiprah di luar sektor domestik, seperti di bidang politik, dapat terwujud.

2. Faktor penghambat pemberdayaan perempuan dalam politik oleh DPW Partai

Perindo Sumut adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- a. Budaya patriarki. Bahwa adanya dikotomi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya pengaruh budaya yang terbentuk di masyarakat yang secara umum masih mengikuti budaya patriarki. Yang akhirnya budaya tersebut mempengaruhi beberapa fungsi dan kedudukan perempuan termasuk sikap politik dan kehidupan sosial kaum perempuan di negara Indonesia.
- b. Sumber daya wanita. Masih rendahnya dan terbatasnya motivasi wanita agar meningkatkan dirinya untuk maju, sikap menerima dan pasrah terhadap keadaan, merasa rendah diri, tidak berdaya dan tidak mandiri. Dengan begitu gerak wanita juga terkendala oleh ukuran-ukuran objektif dari sumber daya manusia, misalnya rendahnya pendidikan dan pengetahuan. Serta faktor pemahaman dan penafsiran yang konservatif terhadap ajaran agama.

5.2 Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Kepada Lembaga KPU mengadakan sosialisasi yang tidak hanya terfokus pada peningkatan partisipasi tetapi juga fokus pada keterwakilan 30% perempuan, serta membuat perubahan yang signifikan mengenai kuota anggota DPRD khusus perempuan. Kepada Pemerintah diharapkan dapat membuat beberapa kebijakan yang membuat masyarakat mengerti dan paham bahwa dalam politik kesetaraan Gender itu diperlukan terutama hak setiap warga negara dalam berpolitik sebagai pemilih maupun sebagai yang mencalonkan diri. Karena budaya patriarki sangat tidak relevan untuk digunakan pada saat pemilu. Dan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab partai pengusung yang memiliki konsen terhadap pemilu dan perempuan saja, tetapi masyarakat juga dituntut untuk bisa aktif terhadap pentingnya peranan perempuan di masyarakat

termasuk di dalam organisasi politik atau non-politik.

- b. Dibutuhkan suatu kampanye nasional berjangka panjang untuk menggugah partisipasi politik perempuan. Yang berisikan kesadaran politik perempuan. Dengan berwujud pendidikan politik yang responsif gender, atau Upaya tersebut adalah kampanye. Yang berisikan penafsiran ulang (reinterpretasi) doktrin-doktrin agama yang selama berabad-abad mencerabut hak politik perempuan melalui media. Apakah itu media cetak atau elektronik. Seperti poster, baliho, stiker dan pin-pin bergambar dikerahkan demi peningkatan partisipasi politik perempuan. Dengan adanya pendidikan politik yang responsif gender dapat meningkatkan rasa percaya diri perempuan. Pada saat yang sama, juga perlu disosialisasikan konsep bahwa arena politik bukan hanya domain laki-laki saja melainkan terbuka bagi semua warga negara termasuk perempuan. Dengan dilakukannya pendidikan responsif gender, menekankan bahwa politik bukan arena yang penuh konflik dan dan intrik sehingga tidak ada yang perlu ditakuti perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Alfadia, D. Z. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan IT/Komputer Hardware dan Software di Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Kota Tangerang*.
- Asang, Sulaiman. 2012. *Membangun Sumber Daya Berkualitas*. Makassar: Brlan Internasional Surabaya.
- Azwar, Saifuddin. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Akbar, Tandjung. 2004. *Analisis Yuridis Para Ahli Hukum*. Pustaka Sinar Harapan.
- Azza, Karam. 2000. *Perempuan Di Parlemen*. Jakarta: Ameerpro.
- Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Basri, Seta. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner.
- Edi, Suharto. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hidajat, Imam. 2009. *Teori-Teori Politik*. Malang: Setara Press.
- Lexy. J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Prijono, Onny S & A. M. W. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Centre Of strategic And International Studies.
- Paramita, Patricia Dhiana. 2017. *Keterkaitan Antara Politik dan Kekuasaan Dalam Organisasi*. Bandung: PT. Refika Adhitama.
- Rahmawati, Fitri. 2004. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pilihan Karir Mahasiswa Akuntansi Sebagai Akuntan Publik*. Skripsi S-1. Akuntansi. UNS.

Sudjana, Djudju. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan (Untuk Pendidikan*
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia). Bandung: Falah Production.

Tikson, Deddy. T. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.

Thomas, Meyer. 2012. *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis. Feriedrich-Ebert-Stiftung (FES)*. Jakarta.

Jurnal:

Anifatul Kiftiyah. 2019. Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia.

Julie Ballington. 2011. Pemberdayaan Perempuan Demi Partai Politik Yang Lebih Kuat Panduan Praktek Terbaik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan, (*United Nations Development Programme And National Democratic Institute*).

Eza Tri Yandy, Muhammad Mustajab. 2021. Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia.

Azmi, Khairul. 2020. Pemberdayaan Perempuan Melalui Pembuatan Makanan Ringan Untuk Meningkatkan Pendapatan Keluarga. Tasikmalaya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Siliwangi.

Shalihin, N. & Firdaus, F. 2019. Transformasi Gender: Strategi Pembebasan Perempuan Dari Jerat Pembangunan Dan Kapitalisme. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(1), 109–140.

Trisnawati, N. A dan Jatningsih, O. 2017. Strategi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, Vol. 05 (03), 486-500.

Widiastuti, Novi. Prita Kartika. 2017. Penerapan Model Kelompok Usaha Kreatif Islami (KUKIS) Dalam Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pondok Pesantren. *Empowerment: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah*, 6 (2): 20-29. DOI.

Firnanda Amdimas, Jendrius Jendrius, Maihasni Maihasni. 2021. Pemberdayaan Perempuan Dalam Partai Politik Di Provinsi Sumatera Barat (Studi Pada Partai Gerindra Dan PPP).

Tsaniatu Zakia. 2021. Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemanfaatan Kain Perca Sebagai Aksesoris Melalui Media Youtube Di Lsm Bening Saguling. *JURNAL COMM-EDU*, 4.

Hardiana, D. 2018. Perilaku Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Pantai Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Buana* 2.(5). 496-506.

Mulyana, Nanang & Zainuddin, Moch. 2017. Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Corporate Social Responsibility (Kasus Pelaksanaan CSR oleh PT. Pertamina UP-IV Balongan). *Jurnal Universitas Padjadjaran*. Vol 4. No.1. hlm. 80 &

84-87.

Muhammad Yusuf Pambudi. 2013. Perempuan Dan Politik (Studi Tentang Aksesibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif Di Kabupaten Sampang). Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, Surabaya.

Nurmila, N. 2015. Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya. KARSA. Vol. 23 No. 1 (1-16).

Yusalia, H. 2014. Pengarusutamaan Gender (Pug) Dalam Tantangan Budaya Patriarki. Wardah, 15(2), 195- 201.

Yuni Retnowati. 2015. Hambatan Budaya terhadap Partisipasi Politik Perempuan.

Komang Eva Oktapiani, Bandiyah, Mirah Mahaswari. 2020. Pemberdayaan Perempuan Dalam Partai Politik Di Provinsi Bali (Studi Pada Partai PDIP, Demokrat dan PSI).

Sri Warjiyati. 2016. Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Internet:

<https://news.okezone.com/read/2017/12/02/340/1824177/pemuda-perindo-sumut-gelar-sekolah-calon-legislatif-bertema-keterlibatan-perempuan-dalam-pileg>

<file:///C:/Users/ACER/Downloads/21166-64732-2-PB.pdf>

<file:///C:/Users/ACER/Downloads/rosalia,+3.+Anifatul+Kiftiah.pdf>

https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/an_Nisa/article/view/1134/568

<https://doi.org/10.22460/empowerment.v6i2p20-29.546>

<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1697>

<https://doi.org/10.19109/wardah.v15i2.198>

<file:///C:/Users/ACER/Downloads/61257-1297-156742-1-10-20200626.pdf>

<https://jurnalsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/104>

<https://news.okezone.com/read/2023/02/04/608/2759114/dpw-partai-perindo-sumut-gelar-konsolidasi-dengan-dpd-medan-bahas-dua-hal-penting>

<http://akindo.ac.id/download.php?file=95Hambatan%20Budaya%20Terhadap%20Partisipasi%20Perempuan.pdf>

<https://www.medanmerdeka.com/2022/12/perindo-optimis-kuasai-segmen-umkm-dan.html>

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

No.	Pertanyaan	Indikator
1.	Bagaimana perencanaan yang dilakukan DPW Partai Perindo Sumut dalam pemberdayaan perempuan dalam politik?	Perencanaan
2.	Seperti apa contohnya?	
3.	Bagaimana kegiatan berlangsung?	
1.	Bagaimana pelaksanaan yang dilakukan DPW Partai Perindo Sumut dalam pemberdayaan perempuan dalam politik?	Pelaksanaan
2.	Seperti apa contohnya?	
3.	Apakah ada dampak positif yang di peroleh?	
1.	Bagaimana evaluasi yang dilakukan DPW Partai Perindo Sumut dalam pemberdayaan perempuan dalam politik?	Evaluasi
2.	Adakah yang harus di perbaiki?	
3.	Adakah kekurangannya?	

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



Sekretaris DPW Partai Perindo Sumut
Ibu Joanna Donna Yulietta Siagian S.E, MAP



Wakil Ketua Bidang Kader, Anggota Dan Saksi DPW Partai Perindo Sumut
Bapak Budianta Tarigan



Wakil Ketua Bidang perempuan & Anak DPW Partai Perindo Sumut
Bapak Iskandar, S.Sos

Lampiran 3 Surat Penelitian



UNIVERSITAS MEDAN AREA PASCASARJANA

Program Magister : Ilmu Administrasi Publik – Agribisnis – Ilmu Hukum – Psikologi –
Manajemen - Program Doktor : Ilmu Pertanian

Jl. Setia Budi No. 79-B TJ. Rejo Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara 20112 Indonesia
Telp. (061) 8201994 Fax. (061) 8226331

Nomor : 1495/PPS-UMA/WD1/01/VIII/2023
Lampiran : -
Hal : **Surat Ijin Penelitian MAP**

31 Agustus 2023

Yth. **DPW Partai Perindo Sumut**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya tugas akhir bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin rekomendasi penelitian / observasi lapangan kepada mahasiswa tersebut namanya dibawah ini:

Nama : **Wim Putra Tri Pratama S**
NPM : **221801013**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
Judul Tesis : **Pemberdayaan Perempuan dalam Politik (Studi DPW Partai Perindo Sumut)**

Untuk melaksanakan pengambilan data di **Kantor DPW Partai Perindo Sumut** bahan melengkapi tugas dalam Penulisan Tesis di Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih!

Cc: File



Direktor Akademik

Dr. Suwandi Hardjo, S.Psi, MA

Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian



SURAT KETERANGAN

Nomor : 136/W.1/DPW.PartaiPerindo.SU/XI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. Rudi Zulham Hasibuan
Jabatan : Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara
2. Nama : Donna Yulietta Siagian, SE., M.A.P
Jabatan : Sekretaris DPW Partai Perindo Sumatera Utara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wim Putra Tri Pratama S
NPM : 221801013
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Tesis : Pemberdayaan Perempuan dalam Politik (Studi DPW Partai Perindo Sumut)

Telah melaksanakan Pengambilan Data dan Wawancara di Kantor DPW Partai Perindo Sumut sebagai bahan untuk melengkapi tugas dalam penulisan Tesis yang berjudul "PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM POLITIK (STUDI DPW PARTAI PERINDO SUMUT)".

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 02 November 2023

DEWAN PIMPINAN WILAYAH

Ketua,

Ir. Rudi Zulham Hasibuan

Sekretaris,

Donna Yulietta Siagian, SE., M.A.P

DEWAN PIMPINAN WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. Cut Nyak Dien No.2C Medan, Telp: 061 4512436

Email : partaiperindo.sumut@gmail.com | Web : <https://sumut.partaiperindo.com>